

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi sesungguhnya berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai "*participation*," yang dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk membangkitkan perasaan serta berpartisipasi atau terlibat dalam aktivitas suatu organisasi. Terkait dengan partisipasi warga dalam proses pembangunan, hal tersebut berarti sejauh mana warga aktif terlibat, di mana partisipasi ini juga mencakup peranan dalam menentukan arahan serta strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Partisipasi dalam ranah politik menjadi aspek krusial dalam struktur pemerintahan yang mengadopsi sistem demokratis. umumnya, partisipasi politik dipahami sebagai aktivitas individu atau sekelompok guna aktif berkontribusi dan terlibat dalam domain politik, yang mencakup pemilihan pemimpin negara serta memengaruhi keputusan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak. Aktivitas ini meliputi aksi yang di dalamnya mencakup pemberian suara pada pemilihan, hadir di pertemuan umum, melakukan diskusi maupun lobi bersama pejabat pemerintah ataupun anggota legislatif, serta bergabung dengan partai politik. Keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan dinamika demokrasi ideal, sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang efisien serta transparan.

Partisipasi pemilih berfungsi sebagai dasar dan praktik demokrasi yang berupaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan keseluruhan serta

berkelanjutan. Satu diantara wujud keterlibatan politik yang memegang peranan krusial di negara demokrasi ialah proses pemungutan suara di tiap pemilu. Agar seseorang dapat berpartisipasi dan memanfaatkan hak politiknya dalam pemilu, mereka harus memenuhi syarat yang relevan selaras atas perundangan berlaku. Selain itu, keberhasilan pemilu sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik ialah satu diantara aspek penting dari keberhasilan demokrasi di sebuah negara. Tingkat partisipasi ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dan kesadaran politik individu. Semakin seseorang memahami bahwa mereka hidup dalam sistem yang dipengaruhi oleh keputusan politik yang diciptakan individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan maka semakin besar pula dorongan mereka untuk terlibat aktif dalam berbagai proses politik, termasuk pemilihan umum. Kesadaran ini menciptakan semangat untuk tidak sekedar sebagai objek kebijakan, melainkan juga subjek yang aktif pada penentuan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan politik atau literasi politik sangat berperan dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu pilar kunci dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis demokrasi. Dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, partisipasi aktif masyarakat di berbagai sektor kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi faktor utama keberhasilan suatu kebijakan publik. Konsep partisipasi ini meliputi lebih dari sekedar aktivitas politik; ia juga mencakup kontribusi warga dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan,

lingkungan, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami, mendukung, dan memperkuat partisipasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inklusif.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, partisipasi masyarakat memiliki fondasi yang kuat, khususnya sejak era reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut menciptakan peluang demokrasi yang lebih besar, terlihat dari meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Undang-undang serta kebijakan yang dikeluarkan pascareformasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, memberikan legitimasi dan dorongan formal bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam penentuan arah dan prioritas pembangunannya.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak semua orang memiliki akses atau peluang yang sama untuk berkontribusi. Perbedaan dalam latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesenjangan informasi sering kali mengganggu keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di beberapa daerah, warga masih menunjukkan sikap pasif atau bahkan kurang peduli terhadap program-program pemerintah karena merasa tidak dilibatkan sejak awal atau lantaran kurangnya transparansi dari pihak penyelenggara. Hal ini menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat bukanlah hal yang otomatis, melainkan memerlukan waktu, pendekatan yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, dalam konteks pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat sangatlah penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah diharapkan untuk mendorong prosedur partisipatif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Namun dalam praktiknya, Musrenbang sering dianggap sekedar formalitas tanpa adanya keterlibatan nyata dari masyarakat. Banyak aspirasi warga yang tidak terakomodasi karena lemahnya representasi, kurangnya informasi yang diterima, serta dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam ranah politik, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), menjadi indikator penting untuk menilai tingkat demokrasi di suatu daerah. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka. Keterlibatan dalam Pilkada mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami hak politiknya serta kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Namun, terdapat masalah seperti politik uang, kampanye negatif, dan rendahnya literasi politik, yang menjadi penghalang serius dalam menciptakan partisipasi yang berkualitas.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Seiring meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam, banyak komunitas lokal mulai berpartisipasi dalam

tindakan konservasi, pengelolaan sampah, serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan kini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mulai bersifat lebih proaktif dan strategis. Pemerintah juga mulai melibatkan warga dalam program seperti bank sampah, desa wisata, dan upaya konservasi ekosistem. Namun, partisipasi ini belum merata dan sering terhambat oleh kurangnya dana, informasi, serta dukungan teknis dari pihak berwenang yang terkait.

Keterlibatan masyarakat juga merupakan elemen krusial dalam pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Dalam berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi, seperti koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan program bantuan sosial, peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Ketika masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, program yang dijalankan biasanya lebih sesuai sasaran dan dapat bertahan lama. Meskipun demikian, masih sering dijumpai situasi di mana bantuan yang diberikan tidak menjangkau komunitas yang sebenar-benar memerlukan, akibat dari data yang lemah dan kurangnya partisipasi dalam proses penentuan masalah dan kebutuhan.

Dalam sektor pendidikan, peran aktif masyarakat terwujud melalui keterlibatan orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar proses belajar menjadi efektif. Inisiatif seperti pendidikan karakter, literasi digital, dan penguatan pendidikan berbasis komunitas tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi

masyarakat secara langsung. Namun, tantangan tetap ada, terutama di daerah terpencil yang mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar.

Di zaman digital saat ini, partisipasi masyarakat juga mengalami perubahan berkat kehadiran berbagai platform media sosial dan aplikasi layanan publik. Warga kini dapat menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, atau melaporkan permasalahan dengan cepat dan luas. Inovasi teknologi ini membuka peluang bagi partisipasi digital yang lebih inklusif, namun juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar partisipasi masyarakat dalam ruang digital dapat berlangsung dengan sehat dan konstruktif.

Keterlibatan masyarakat mencerminkan semangat demokrasi dan kemandirian warga negara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ini bukan hanya sekedar ikut serta dalam berbagai kegiatan, melainkan juga merupakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran serta di berbagai aspek kehidupan bersama. Partisipasi yang bermakna haruslah berbentuk partisipasi yang informatif, deliberatif, dan inklusif. Artinya, masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk hadir, tetapi juga perlu diberikan informasi yang memadai, kesempatan untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat, serta keterlibatan yang merata dari berbagai kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dalam konteks pengembangan yang berfokus pada komunitas, partisipasi publik sering kali dianggap sebagai landasan utama yang menentukan keberlangsungan sebuah program. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam

proses penentuan masalah, penyusunan solusi, dan pelaksanaan kegiatan, perasaan memiliki terhadap program tersebut akan muncul secara alami. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hasil pembangunan, tetapi juga mendorong solidaritas sosial, memperkuat hubungan antarwarga, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sinilah pentingnya pendekatan partisipatif yang bersifat bottom-up, menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan bukan hanya pelengkap administratif.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pendekatan partisipatif di berbagai daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif. Masih banyak program pembangunan yang bersifat terpusat dan hanya memandang masyarakat sebagai obyek, bukan subyek pembangunan. Dalam banyak hal, proses perencanaan pembangunan hanya melibatkan sejumlah kecil elite lokal atau tokoh tertentu, tanpa partisipasi yang luas dari masyarakat umum. Akibatnya, aspirasi yang terakomodasi sering kali tidak mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya dari masyarakat. Program-program tersebut pun menjadi tidak tepat sasaran dan berpotensi memperdalam ketimpangan sosial.

Perlu juga dicatat bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan sosial. Dalam suatu masyarakat yang tidak seimbang, di mana akses terhadap informasi, pendidikan, dan ekonomi tidak merata, hanya sebagian kecil dari populasi yang dapat benar-benar terlibat secara aktif. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan berpendapatan rendah, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat biasanya tidak diberikan kesempatan atau malah terbuang dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, usaha untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat perlu sejalan dengan penguatan inklusi sosial dan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.

Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat krusial sebab pemerintah daerah memiliki wewenang besar dalam mengelola wilayah mereka. Otonomi lokal memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerah mereka. Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru. Tidak semua wilayah memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat untuk mendukung partisipasi. Banyak kepala daerah yang masih cenderung menerapkan pendekatan otoriter dan enggan membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi tanpa komitmen terhadap keterbukaan dan transparansi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik juga menjadi masalah penting yang sering kali terabaikan. Pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan anggaran daerah sangat penting agar dana publik dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, partisipasi publik dalam proses penganggaran partisipatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kenyamanan dalam pengelolaan anggaran. Ketika masyarakat diberikan peluang untuk memberikan masukan, menentukan prioritas belanja, dan mengawasi pelaksanaan anggaran, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga sangat berkaitan dengan penguatan lembaga demokrasi lokal. Lembaga-lembaga seperti

Badan Permusyawaratan Desa, forum RW/RT, dan lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peranan strategis dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah. Namun, seringkali kapasitas lembaga-lembaga ini masih rendah. Keterbatasan pelatihan, kurangnya dukungan dana, dan lemahnya sistem koordinasi membuat peran mereka tidak optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan adalah langkah penting untuk memperluas dan memperdalam partisipasi masyarakat.

Partisipasi juga bisa muncul dalam bentuk aksi kolektif masyarakat seperti gotong royong, solidaritas dalam menangani bencana, hingga advokasi hak-hak masyarakat. Bentuk partisipasi informal ini sering kali lebih adaptif, cepat, dan sesuai dengan konteks lokal. Kekuatan jaringan sosial dan budaya lokal menjadi aset sosial yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang bersifat partisipatif perlu memadukan pendekatan formal dan informal dengan seimbang.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan keterampilan partisipatif di kalangan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan harus diintegrasikan secara mendalam dalam kurikulum baik formal maupun informal. Sekolah, organisasi masyarakat, dan media harus berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan warga negara yang kritis, peduli, dan siap berkontribusi bagi komunitasnya. Pendidikan yang mendorong partisipasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menstimulasi refleksi kritis, keberanian untuk

berbicara, kemampuan berkolaborasi, serta keterampilan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Selain itu, media informasi memiliki peran penting dalam membentuk pandangan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat. Dengan laporan yang objektif, mendalam, dan informatif, media dapat membantu masyarakat memahami persoalan terkait kebijakan publik, politik, dan pembangunan. Media juga bisa menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta alat untuk memantau kinerja pemerintah secara terbuka. Namun, maraknya informasi yang tidak akurat, tidak seimbang, atau bahkan palsu, justru dapat menyesatkan opini publik dan mengurangi kualitas keikutsertaan. Oleh karena itu, penting bagi media untuk melaksanakan peran edukasi dan kontrol sosial secara profesional dan menjamin keseimbangan informasi yang diterima publik.

Partisipasi masyarakat juga sangat terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika pemerintah bersikap terbuka, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk berperan aktif. Di sisi lain, jika pemerintah dianggap korup, tidak transparan, atau tidak peduli pada masyarakat kecil, maka masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh dan skeptis terhadap panggilan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik lewat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi.

Peran generasi muda dalam mendukung partisipasi masyarakat sangat penting. Anak muda merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dengan semangat, inovasi, dan kemampuan kritis yang tinggi. Melalui berbagai forum,

media sosial, dan komunitas, anak muda dapat menjadi penggerak perubahan sosial dan politik. Gerakan-gerakan seperti komunitas relawan, forum anak muda di desa, dan inisiatif digital dari warga menjadi contoh nyata partisipasi generasi muda yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan ruang dan dukungan yang cukup agar kemampuan anak muda dalam memperkuat partisipasi masyarakat dapat terus berkembang.

Dalam keadaan darurat atau bencana, partisipasi masyarakat sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat dalam evakuasi, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan kesiapan komunitas. Pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya seorang diri dalam menghadapi situasi krisis; partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pendukung yang sangat diperlukan. Dengan demikian, pelatihan untuk kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, serta sistem peringatan dini yang berbasis komunitas harus ditingkatkan agar keterlibatan masyarakat dalam keadaan darurat menjadi lebih terarah dan efektif.

Penglibatan juga merupakan elemen yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah inklusi, yang berarti melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dalam proses pembangunan. Pendekatan pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi dapat menghasilkan kebijakan yang eksklusif dan merugikan beberapa kelompok. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam merancang agenda pembangunan berkelanjutan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangatlah

penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, variasi dalam tingkatan partisipasi politik masyarakat pada pemungutan suara dan hak suara sering kali terjadi selaras atas perubahan dalam politik. Berbagai elemen dipercaya berkontribusi terhadap tingginya atau rendahnya partisipasi politik individu, termasuk pemahaman politik serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Pemahaman politik diartikan sebagai kesadaran akan hak serta tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, yang mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian individu terhadap komunitas serta konteks politik di sekitarnya.

Pada komunitas yang lebih tradisional, di mana politik seringkali menyatu dengan kehidupan sehari-hari, partisipasi cenderung tinggi dan sering kali sulit untuk dipisahkan dari aktivitas lainnya. Sebaliknya, di masyarakat yang saling berhubungan melalui komunikasi dan lembaga, serta terpengaruh oleh unsur modern dan tradisional, partisipasi mungkin akan terhambat oleh hal-hal seperti sikap apatis dan isu-isu komunikasi yang meluas. Sementara itu, pada masyarakat yang memiliki sistem totaliter, partisipasi bisa jadi sangat tinggi atau justru sangat rendah.

Masyarakat sebagai kelompok manusia yang paling luas sifatnya, terdiri dari unit-unit yang lebih spesifik, tetapi tidak selalu memiliki norma pengikat yang sama antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Kesatuan sosial yang tidak memiliki norma pengikat ini mirip dengan “kerumunan” yang telah kita bahas sebelumnya, yang tidak memiliki karakteristik sebagai masyarakat.

Tipe sosial merupakan sekumpulan orang yang terbentuk karena adanya karakteristik atau area pengenalan diri yang bisa diterapkan kepada orang-orang tersebut. Pengenalan diri ini biasanya berasal dari pengaruh luar terhadap tipe sosial itu tanpa disadari oleh individu terkait, dengan tujuan tertentu yang praktis. Sebagai contoh, dalam suatu negara, hukum menetapkan klasifikasi warga berdasarkan umur, yaitu mereka berusia lebih dari 18 tahun dan yang masih di bawah 18 tahun, untuk membedakan antara individu yang mempunyai hak suara serta yang tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini, penelitian mengenai partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya mencerminkan kondisi partisipasi saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kelemahan serta mengembangkan praktik-praktik baik. Diharapkan penelitian ini akan mampu menggambarkan berbagai dinamika partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan, strategi pemberdayaan, serta pembentukan sistem partisipatif yang lebih baik di masa depan.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat literatur terkait partisipasi masyarakat di Indonesia. Masih banyak aspek yang belum dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari pola partisipasi di kawasan perkotaan dan pedesaan, pengaruh budaya setempat, hingga peran aktor-aktor nonpemerintah dalam meningkatkan keterlibatan warga. Dengan mengangkat

topik ini, peneliti berharap bisa memperkaya diskusi akademis serta memberikan manfaat praktis bagi para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan.

Sebagai penutup, partisipasi masyarakat tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pendidikan, pelatihan, dan perjuangan yang panjang. Setiap langkah kecil menuju partisipasi yang lebih luas dan berharga adalah investasi untuk masa depan negara. Oleh sebab itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk merawat, memperkuat, dan memperluas ruang partisipasi dalam kehidupan bersama.

Didasarkan kepada latar belakang penelitian yang sudah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap “Partisipasi Masyarakat Kelurahan Semolowaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Surabaya Pada Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Seberapa besar Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 Di Kelurahan Semolowaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Memahami Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kelurahan Semolowaru pada tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti mampu mengidentifikasi suatu kekurangan dan kelebihan dari penelitian tersebut dan memberikan informasi bagi diri sendiri serta bagi pembaca.

2. Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa

Penelitian berperan sebagai satu diantara upaya guna merealisasikan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan sekaligus wadah pembuktian diri. Selanjutnya, bagi mahasiswa terkait penelitian ini mampu berperan sebagai pengalaman pada dinamika penyelenggaraan penelitian.

3. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Manfaat dari penelitian bagi masyarakat adalah untuk mempelajari metode yang efektif dalam berbisnis serta bermanfaat bagi individu atau kelompok yang ingin memulai sebuah usaha.